

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2010, pemerintah Australia menginisiasi serta menandatangani sebuah proyek bantuan guna melindungi anak-anak dari objek eksploitasi seksual akibat perjalanan dan pariwisata, yang akan diimplementasikan tahun 2012.<sup>1</sup> Proyek tersebut bernama *Project Childhood* yang memiliki target kepada negara-negara Asia Tenggara yaitu Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Keempat negara tersebut termasuk dalam wilayah yang dilalui Sungai Mekong, yang kemudian dapat disebut sebagai negara sub-kawasan Mekong Raya (GMS).<sup>2</sup>

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar didunia yang berdampak besar pula pada pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Khususnya, apabila melihat pertumbuhan ekonomi pada Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam selaras dengan pertumbuhan jumlah turis yang meningkat sejak beberapa dekade terakhir.<sup>3</sup> GMS menjadi kawasan yang cukup menarik perhatian turis untuk datang dengan berbagai alasan seperti urusan pekerjaan ataupun sekadar berlibur. Banyaknya aktivitas kedatangan untuk urusan pariwisata, sangat disambut baik oleh pemerintah.

Signifikansi dampak pariwisata terhadap perekonomian dipercaya berkontribusi positif bagi *receiving countries*. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila

---

<sup>1</sup> Martina Nicolls dan Shelley Casey, *Independent Mid-Term Evaluation Report: Project Childhood: Child Sexual Exploitation in Travel and Tourism (CSETT), Mekong Sub-Region*. GRMInternational, 2013.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> World Vision Australia. *Child Safe Tourism: The Tourist Perspective*. 2012

negara cukup terbuka akan akses pariwisata, dengan didukungnya pengembangan-pengembangan industri pariwisata di dalamnya. Tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, secara bersamaan, signifikansi terhadap isu permasalahan terkait lingkungan dan sosial juga turut meningkat. Salah satunya adalah permasalahan sosial yang dapat menimpa anak-anak.<sup>4</sup> Anak-anak yang dimaksudkan bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Anak-anak lokal rentan menjadi korban eksploitasi di lingkungan pariwisata. Dapat terlihat jelas pula konektivitas antara eksploitasi anak dengan pariwisata yang didorong oleh kepentingan perekonomian. Salah satunya yang disoroti pula dalam penelitian ini adalah eksploitasi seksual pada anak-anak yang tidak hanya ada pada level nasional, namun telah mencakup level transnasional.

Individu dari negara asalnya, melakukan perjalanan pariwisata ke negara lain yang kemudian ikut mengambil bagian dalam prostitusi anak pada negara yang dituju. Fenomena ini kemudian dipandang sebagai *Child Sex Tourism (CST)*.<sup>5</sup> Anak-anak bahkan keluarga yang dikategorikan rawan menjadi korban CST, kerap kali digunakan untuk menarik perhatian turis dengan tujuan utama untuk menambah pemasukan destinasi pariwisata. Tentunya, tidak ada satupun negara yang melegalkan anak-anak dibawah umur untuk menjadi korban objek seksual para turis. Adanya CST menunjukkan bahwa perlindungan dan keamanan bagi anak-anak tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Umumnya para korban akan direkrut untuk bekerja sebagai *sex workers* bagi para *travelling sex offenders*.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Sebagai pekerja, anak akan kehilangan hak yang seharusnya dapat diperoleh oleh seperti anak-anak seusianya, sederhananya seperti tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya, serta terpaksa berada dalam situasi yang berbahaya bagi anak-anak.<sup>6</sup> Minimnya perlindungan pada anak-anak mengakibatkan anak-anak lokal terjebak dalam kondisi yang rentan untuk dieksploitasi dan menerima kekerasan seksual.

GMS merupakan salah satu sub-kawasan yang rentan terjadinya CST. Menurut UNODC (2013) GMS merupakan wilayah yang paling diincar oleh para *travelling child sex offenders* untuk mendapatkan layanan seks anak-anak lokal. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, para *offenders* dengan mudah mendapatkan informasi tentang layanan CST.<sup>7</sup> Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama fenomena CST banyak terjadi di negara berkembang.

Sayangnya, sulit untuk menemukan jumlah pasti korban CST. Beberapa kendala yang umum ditemui adalah proses penyelidikan yang kompleks dikarenakan melibatkan korporasi kedua negara pihak, kurangnya bukti konkret selain kesaksian korban, atau bahkan korban yang notabene adalah anak-anak tidak tahu bahwa hal tersebut adalah eksploitasi seksual yang seharusnya tidak boleh terjadi. Biasanya, CST tidak hanya terjadi pada industri pariwisata besar saja seperti hotel, dan bar. CST dapat terjadi pada lingkup yang lebih privat seperti *orphanage tourism* yang memungkinkan *offenders* berinteraksi dengan anak-anak di rumah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Marianna Brungs. *Abolishing Child Sex Tourism: Australia's Contribution*. Australian Journal of Human Rights – Hal 101-124. 2002

<sup>7</sup> UNODC-Lao PDR. *Better Regional Coordination Needed To Fight Online Sexual Abuse Of Children In The Greater Mekong Sub-Region*. dalam <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/laopdr/2013/06/project-childhood/story.html> (Diakses 9 Desember 2021). 2013.

<sup>8</sup> Thomas Bauer, dkk. *Sex and Tourism: Journeys of Romance, Love, and Lust*. 2003.

Dengan demikian, industri pariwisata dapat membuat anak-anak semakin *accessible* terhadap eksploitasi seksual di mana pun.

Namun, berkat kemudahan akses teknologi dan informasi pula, tidak dapat dipungkiri jika isu CST semakin cepat beredar yang kemudian mendapatkan perhatian komunitas internasional. Seperti UNICEF yang mulai lebih fokus pada pembebasan anak-anak yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi, dan *End Child Prostitution in Asian Tourism* (ECPAT) sebuah organisasi yang dibentuk dengan memiliki fokus kampanye memerangi CST di Asia.<sup>9</sup> Upaya ini juga bersamaan dengan usaha dari organisasi privat dengan negara yang mengadopsi piagam, protokol, juga membuat peraturan dalam rangka memerangi isu CST. Sinergitas antara *receiving countries* (korban CST) dan *sending countries (offenders)* pun sangat diperlukan terkait transfer informasi dan penegakan hukum dalam memerangi CST. Salah satunya adalah upaya pemerintah Australia dalam melihat fenomena CST. Pemerintah Australia melalui *Australian Agency for International Development* (AusAID) berupaya melindungi anak-anak unuk melawan eksploitasi dan kekerasan seksual yang terjadi akibat perjalanan dan pariwisata di GMS.

Di bawah tekanan internasional, setidaknya sebagian besar *receiving countries* telah memulai langkah untuk memodernisasi aturan hukum untuk melindungi anak-anak, namun masih banyak ditemukan celah yang mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat. Realitas banyaknya kendala penegakkan hukum oleh *receiving countries* menunjukkan bahwa *sending countries* perlu berbagi tanggung jawab atas *offenders* warga negaranya yang memicu *demand* CST.

---

<sup>9</sup> Ian Voelkel. *Child Sex Tourism and the Lack of Deterrence that Drives the Problem*. All Regis University Theses – 2017 Hal 877

Sebuah organisasi non pemerintah di Australia yang bergerak dibidang isu perdagangan manusia nasional maupun internasional, *Child Wise*, menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2007, sebanyak lebih dari 250.000 kunjungan pariwisata seksual (termasuk CST) terjadi di Asia yang mayoritas kasus ada pada GMS. Sebanyak 13% *offenders* adalah mereka yang berasal dan berkewarganegaraan Australia.<sup>10</sup>

Dalam keterkaitan hubungannya dengan *receiving countries*, tanggung jawab *sending countries* dapat dilaksanakan dalam berbagai cara. Menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial, merupakan salah satu sarana mengekspresikan diplomasi dan kebijakan luar negeri suatu negara. Lebih dari tiga puluh dua negara telah memberlakukan ini untuk menangani penuntutan atas pelaku di luar negeri terkait kasus CST. Selain itu, negara bersama organisasi internasional

perlu mengembangkan kerja sama untuk mengeluarkan inisiatif baru. Pembuatan perjanjian dan kesepakatan antara *sending* dan *receiving countries*, hingga pembentukan sebuah proyek khusus yang memungkinkan *sending countries* memberikan bantuan khusus terkait pendanaan ataupun hukum kepada *receiving countries* untuk penanganan kasus CST.<sup>11</sup>

AusAID memulai dua pilar yaitu *prevention pillar* dan *protection pillar* dalam *Project Childhood*. Dalam mengimplementasikan proyek ini, Australia menggandeng UNODC dan Interpol untuk mengimplementasikan proyek perlindungan. Sedangkan pada pilar pencegahan Australia juga menggandeng

---

<sup>10</sup> Deanna Davy. *Understanding the complexities of responding to child sex trafficking in Thailand and Cambodia*. International Journal of Sociology and Social Policy. 2014.

<sup>11</sup> Kalen Fredette. *International Legislative Efforts To Combat Child Sex Tourism Evaluating Council of Europe Convention on Commercial Child Sexual Exploitation*. . Int'l & Comp. L. Rev. 1. 2009

*World Vision* untuk berpartisipasi pada *Project Childhood*.<sup>12</sup> Melalui proyek ini, AusAID memberikan pendanaan sebesar \$7,5 juta AUD yang akan didistribusikan kepada dua pilar selama masa pengimplementasiannya.<sup>13</sup>

Gambar 1.1 Daftar negara donor untuk Greater Mekong Subregion 2011-2012

(Millions of United States dollars)

	Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Myanmar	Thailand	Viet Nam	Total
<b>Australia</b>	86	54	51	12	141	344
<b>Japan</b>	159	73	68	292	1 698	2 290
France		16		15	241	272
Republic of Korea	60	29		4	177	270
United States of America	82		31	56	100	269
Germany	48	28		20	118	214
Sweden	32		19	9		60
Denmark			16		64	80
United Kingdom			55			55
Switzerland		23				23
Norway			21			21
Luxembourg		17				17

Sumber: OECD dalam Christopher Selvarajah<sup>14</sup>

Berdasarkan tabel di atas, dapat bahwa Australia merupakan negara yang cukup aktif memberikan bantuan kepada negara-negara di GMS.<sup>15</sup> Pemberian bantuan kepada negara lain dapat diketahui digolongkan sebagai salah satu kebijakan luar negeri Australia. Terhitung pada periode 2011-2012, Australia merupakan negara donor kedua terbesar setelah Jepang untuk pembangunan di setiap negara anggota GMS dengan total rata-rata bantuan sebesar \$344 juta USD.<sup>16</sup> *Project Childhood* merupakan satu dari sekian kebijakan luar negeri Australia dalam rangka penanganan isu CST di GMS. Tentunya, suatu negara memiliki

<sup>12</sup> World Vision Australia. *Op.cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Aid Statistics: Aid At A Glance Charts dalam Christopher Selvarajah. *Foreign Aid Imperatives In The Greater Mekong Subregion: Case Studies Of Australian, Japanese And Thai Aid Coordination*. Asia-Pacific Development Journal- Vol. 21(1) 2014

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

alasan dan kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakannya. Kepentingan negara untuk melakukan sesuatu, umumnya akan dilatar belakangi oleh beberapa situasi dan kondisi terkait yang dapat terjadi akibat pengaruh luar maupun dalam negara tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tinjauan literatur dari *Gendering Cross-Border Networks In The Greater Mekong Subregion: Drawing Invisible Routes to Thailand* oleh Ullah dan Hossain yang menjelaskan kompleksitas fenomena perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual di wilayah Thailand dan sekitarnya. Literatur ini menjadi salah satu sumber yang seringkali penulis gunakan untuk melihat fenomena CST.<sup>17</sup> Yang kedua, penulis menggunakan literatur *Abolishing child sex tourism: Australia's contribution* oleh Brungs yang menjelaskan upaya Australia memerangi CST hingga tahun 2002.<sup>18</sup> Namun penelitian ini terbatas pada upaya-upaya domestik saja. Selanjutnya penulis juga menggunakan *report* pelaksanaan *Project Childhood* untuk mendukung data penelitian. Sehingga melalui beberapa tinjauan literatur di atas, penulis akan mengatasi kurangnya penelitian mengenai faktor domestik yang mempengaruhi Australia dalam kebijakan luar negerinya pada *Project Childhood* dalam rangka memerangi CST di GMS.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Apa saja faktor domestik kebijakan luar negeri Australia dalam memerangi *Child Sex Tourism* di *Greater Mekong Subregion* melalui *Project Childhood* 2010-2014?”**

---

<sup>17</sup> Ullah dan Hossain. *Gendering Cross-Border Networks In The Greater Mekong Subregion: Drawing Invisible Routes To Thailand*. ASEAS - Austrian Journal of South-East Asian Studies –Vol 4(2) Hal 273-289. 2011

<sup>18</sup> Marianna Brungs. *Op. cit.*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Secara Umum**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

#### **1.3.2 Secara Khusus**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja faktor domestik kebijakan luar negeri Australia dalam memerangi *Child Sex Tourism* di *Greater Mekong Subregion* melalui *Project Childhood* 2010-2014.

### **1.4 Kerangka Penelitian**

#### **1.4.1 Child Sex Tourism**

Menurut World Vision (2010) dalam Ullah dan Hossain (2011) tipologi perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi 8 kategori: perdagangan tenaga kerja, tenaga kerja terikat, perbudakan paksa, perbudakan rumah tangga paksa, pekerja anak paksa, perdagangan seks dan prostitusi, tentara anak, dan yang terakhir yaitu pariwisata seks anak (CST).<sup>19</sup> Berdasarkan tipologi tersebut dapat diketahui bahwa siapapun dapat menjadi korban perdagangan manusia, selama masih adanya permintaan untuk itu. Salah satunya yaitu kepada anak-anak dalam fenomena CST. Fenomena CST tidak akan ada tanpa adanya permintaan seks komersial dari para *travelling offenders* yang memiliki target anak-anak lokal dari *receiving countries* yang baik laki-laki maupun perempuan.<sup>20</sup> Tentunya mereka yang terjebak pada permasalahan ini sangat rentan untuk menerima eksploitasi dan kekerasan dari para pelaku.

---

<sup>19</sup> Ullah dan Hossain. *Op.cit*

<sup>20</sup> Thomas Bauer, dkk. *Op.cit.*



Selama lebih dari 20 tahun, sebuah bentuk baru dari perdagangan manusia dalam hal prostitusi muncul dengan sebutan CST. Sesuai dengan namanya, pelaku adalah *travelling child sex offenders*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interaksi korban dan pelaku yang melewati batas negara, karena pada umumnya pelaku adalah mereka yang sedang berlibur atau turis, *business travellers*, dan orang asing yang tinggal sementara di *receiving countries*.<sup>21</sup>

Penyebab para korban yaitu anak-anak dapat terlibat dalam permasalahan ini bisa datang dari berbagai latar belakang. Namun, hal yang paling sering ditemui adalah karena permasalahan kemiskinan yang didukung oleh kurang tereduksinya mereka akan bahaya prostitusi di usia mereka. Berbeda dengan mereka para orang dewasa yang masih diwajibkan untuk memilih prostitusi sebagai sumber penghasilannya. Contohnya adalah Thailand, anak-anak yang terlibat dalam CST biasanya berasal dari area rural di Thailand yang berharap pada janji palsu pekerjaan untuk membantu orang tua mereka, diskriminasi ras, dan parahnya mereka dapat diculik langsung oleh pihak rumah bordil dan prostitusi. Begitu puladengan negara GMS lainnya, yang karena berada pada satu wilayah pergerakan *paratravelling child sex offenders* menjadi lebih mudah.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, dalam buku *Sex and Tourism: Journeys of Romance, Love and Lust* (2003) CST dibagi dalam 2 kategori.<sup>23</sup> Pertama, eksploitasi dan kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh para pedofil. Para pedofil dengan sengaja datang ke destinasi pariwisata di luar negaranya untuk secara spesifik mencari anak-anak yang akan menjadi target aktivitasnya. Mereka biasanya disebut sebagai ‘predator’ secara alami dan memiliki jejaring dengan pedofil lain di seluruh dunia untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Marianna Brungs. *Op. cit.*

<sup>23</sup> Thomas Bauer, dkk. *Op.cit.*

menemukan tempat yang tepat serta memiliki kemungkinan kecil untuk ditangkap. Para pedofil jarang menggunakan jasa rumah bordil, mereka seringkali merayu anak-anak jalanan untuk dibawa ke hotel atau penginapan dengan iming-iming imbalan berupa uang, baju, dan apapun yang anak inginkan.<sup>24</sup>

Kedua, eksploitasi dan kekerasan seksual anak oleh *opportunistic sex offenders*. Umumnya mereka adalah *offenders* yang mengunjungi rumah bordil dan bar di suatu area wisata untuk mendapatkan targetnya. Mereka biasanya berperilaku egois dan membenarkan tingkah laku aktivitasnya ini dengan dalih “selagi pergi berlibur, siapa yang peduli?”. Industri pariwisata yang demikian memang bukan pariwisata pada umumnya. Industri pariwisata yang mengkomersialkan aktivitas seksual merasa bahwa *exotic experience* merupakan daya tarik yang menguntungkan, akibatnya anak-anak pun dijadikan sebagai objek untuk menarik perhatian wisatawan.<sup>25</sup>

#### ***1.4.2 Domestic Determinant of Foreign Policy***

Politik luar negeri merupakan salah satu hal yang selalu menyertai perkembangan studi hubungan internasional. Negara dianggap sebagai aktor utama dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Namun tidak menutup kemungkinan pula, apabila aktor-aktor non negara turut berperan aktif dalam terlaksananya praktik politik luar negeri. Negara perlu memperhatikan serta merumuskan dengan matang apa yang menjadi arah politik luar negerinya. Dalam perumusannya, politik luar negeri akan selalu dipengaruhi oleh urusan eksternal dan internal negara. Keduanya dapat dipersepsikan sebagai suatu proses bagaimana

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

negara memandang tujuan dari politik luar negerinya.

Sebagai suatu output dari politik luar negeri, kebijakan luar negeri merupakan sebuah susunan terstruktur apa yang hendak negara lakukan utamanya dalam kaitan berinteraksi dengan pihak di luar negara.<sup>26</sup> Sebagai sebuah rencana lanjutan, tentunya dalam sebuah kebijakan luar negeri pasti memuat tujuan dan maksud dari tindakan negara. Situasi seperti ini juga dapat disebut sebagai usaha negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga dapat diketahui bahwa cermin dari kepentingan nasional dapat dilihat dari kebijakan luar negerinya.

Sebagai penentu sebuah kebijakan luar negeri, biasanya akan dipengaruhi oleh banyak hal lingkungan eksternal dan lingkungan internal, pendekatan untuk melihat ke luar dan melihat ke dalam, ataupun faktor internasional dan domestik.<sup>27</sup> Merumuskan kebijakan luar negeri tidak akan cukup bila berasal dari situasi sistem internasional saja. Menyesuaikan dengan apa yang berada dalam lingkup negara juga tak kalah pentingnya.

Howard Lentner mengklasifikasikannya ke dalam 2 kelompok determinan, yaitu: determinan luar negeri dan determinan domestik.<sup>28</sup> Determinan luar negeri yaitu menunjukkan bagaimana situasi sistem internasional pada waktu tersebut dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Umumnya didorong oleh suatu fenomena internasional menonjol yang kentara ada sebagai respon negara menghadapi fenomena tersebut. Sedangkan determinan domestik menggambarkan saat negara mengambil kebijakan luar negeri tersebut. Situasi-situasi dalam negeri yang mendukung negara untuk mengambil suatu kebijakan luar

---

<sup>26</sup> Valerie Hudson. *Foreign Policy Analysis and the Ground of International Relations*. ForeignPolicy Analysis. 2005

<sup>27</sup> Howard Lentner. *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. Ohio: Billand Howel. 1974.

<sup>28</sup> *Ibid.*

negeri termasuk dalam determinan domestik.<sup>29</sup>

#### ***1.4.2.1 Highly Stable***

Yang pertama yaitu determinan yang menunjukkan komponen-komponen *fixed* (tidak akan berubah dalam waktu yang lama) dalam suatu negara. Komponen ini umumnya meliputi berbagai faktor alam yang mustahil untuk berubah dalam waktu hitungan tahun singkat seperti: kenampakan alam (geografis), wilayah, iklim di suatu negara, bentuk daratan, demografi, dan ketersediaan sumber daya alam sebagai suatu aset negara. Hal-hal tersebut secara fundamental dapat memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, misalnya terkait dengan kedekatan jarak negara pembuat kebijakan ke negara tujuan kebijakan tersebut.<sup>30</sup> Negara cenderung lebih banyak berinteraksi dengan negara yang ada disekitarnya, sehingga diharapkan antar negara dalam suatu wilayah dapat menjalin hubungan yang baik. Selain itu, apabila suatu negara hendak memberikan bantuan, negara juga akan cenderung memilih yang lebih dekat untuk memudahkan mobilisasi dan melakukan pengontrolan dalam bantuan tersebut. Selain itu, demografi masyarakat salah satu di dalamnya ialah migrasi juga dapat menentukan perumusan kebijakan luar negeri sebagai tanggung jawab negara atas aktivitas yang dilakukan rakyatnya di negara tujuan kebijakan luar negeri tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nicholas J. Spykman. *Geography and Foreign Policy*. The American Political Science Review –Vol. 32(1). Hal 273-289. 1938

<sup>31</sup> Kyle Grayson dan David Dewitt. *Global Demography and Foreign Policy: A Literature Brief and Call for Research*. YCISS Working Paper. No. 24. 200

#### ***1.4.2.2 Moderately Stable***

Yang kedua yaitu determinan yang menunjukkan komponen-komponen yang masih dapat berubah dalam hitungan tahun di dalam suatu negara. Komponen ini dapat berubah-ubah biasanya karena mengikuti situasi politik pemerintahannya (setiap rentang waktu tertentu, pergantian pemerintahan memungkinkan adanya pergantian kebijakan luar negerinya. Hal yang meliputi determinan ini adalah budaya politik suatu negara, gaya kepemimpinan dari pemimpin yang sedang menjabat, proses politik/ sistem pemerintahan, sehingga merujuk pula pada kebijakan domestiknya.<sup>32</sup> Dalam hal ini, kebijakan luar negeri seringkali dihubungkan sebagai perpanjangan dari kebijakan dalam negeri suatu negara.<sup>33</sup> Suatu kebijakan luar negeri memungkinkan untuk dibentuk untuk membantu negara menerapkan kebijakan dalam negerinya, bias berupa penegakan hukum, dan sebagainya.

#### ***1.4.2.3 Unstable***

Sebagai yang terakhir, yaitu determinan yang dinyatakan paling tidak stabil diantara semuanya. Determinan ini biasanya dapat tiba-tiba muncul dikondisi tertentu. Hal yang meliputi determinan ini adalah bagaimana ungkapan persepsi suatu negara untuk waktu kedepannya dengan jangka waktu yang panjang (prediksi), dan faktor ketidaksengajaan yang tiba-tiba muncul menginterupsi apa yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>34</sup> Seperti halnya opini publik atas suatu fenomena. Pandangan masyarakat suatu negara atas suatu isu maupun fenomena dinilai krusial utamanya apabila negara tersebut menganut sistem yang demokratis.

---

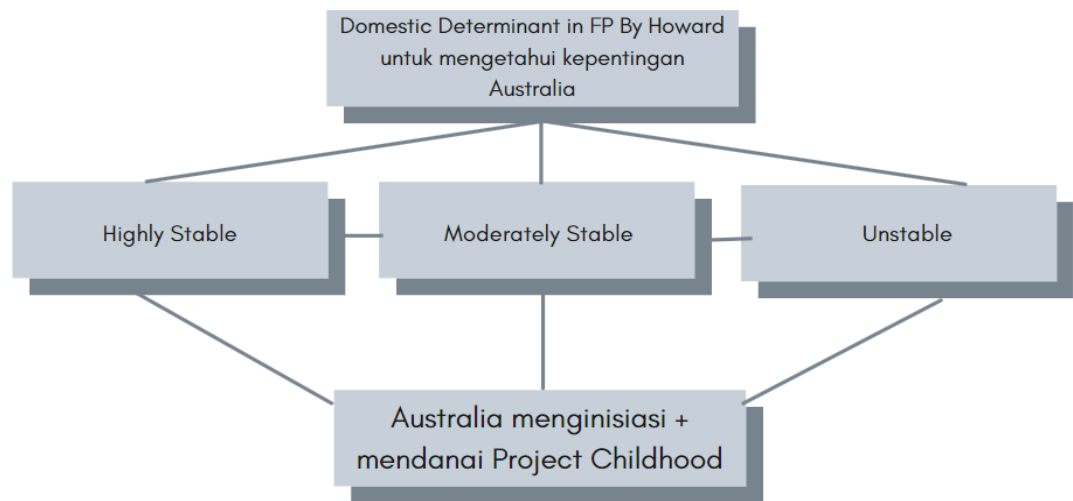
<sup>32</sup> Howard Lentner. *Op. cit.*

<sup>33</sup> Zaara Z Hussain. *The Effect of Domestic Politics on Foreign Policy Decision Making*. E-International Relations ISSN 2053-8626. 2011

<sup>34</sup> Howard Lentner. *Op. cit.*

Sehingga hal ini dapat menjadi suatu faktor dari dalam untuk negara memfasilitasi opini publik dalam kebijakan luar negerinya.<sup>35</sup>

### 1.5 Sintesa Pemikiran



Sintesa pemikiran di atas merupakan alur berpikir penulis yang bermula dari *Domestic Determinant in Foreign Policy* berdasarkan Howard yang terbagi kepada tiga jenis faktor yaitu *highly stable*, *moderately stable*, dan *unstable*. Ketiganya kemudian digunakan untuk mengetahui factor domestic Australia dalam mengambil kebijakan luar negeri dalam penginisiasian dan pendanaan *Project Childhood*. Sehingga akan dijabarkan bagaimana ketiga faktor tersebut dapat menjadi penyebab kebijakan luar negeri Australia dalam proyek ini.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka berpikir, dan sintesa pemikiran, penulis memiliki argumen utama bahwa dalam hal keterlibatan Australia di *Project Childhood*, faktor domestik termasuk berperan besar terhadap kebijakan luar negeri Australia dalam upayanya memerangi *child sex tourism* di GMS. Faktor domestik tersebut akan terbagi menjadi 3 poin turunan yang akan dijelaskan lebih lanjut yaitu (1) *highly stable factor*, berfokus pada letak geografis Australia dan aksesibilitasnya menuju negara-negara GMS, hal ini juga berkaitan dengan *travelling child sex offenders* berkewarganegaraan Australia.

(2) *moderately stable factor*, membahas mengenai dinamika kebijakan publik Australia dalam hal mengkriminalisasi warga negaranya yang didapati sebagai *traveling sex child offenders*. Sebagaimana Australia beberapa kali telah melakukan pembaharuan kebijakan dalam negerinya, yang salah satunya juga merupakan hasil dari peran aktifnya mengadopsi dan meratifikasi konvensi internasional terkait isu ini agar lebih tegas untuk menindak para *travelling child sex offenders*. Seperti pada tahun 2010, yaitu bertepatan dengan tahun penginisiasian *Project Childhood*, Australia memperkuat hukumnya untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia dari fenomena *sex tourist* dengan memberlakukan yurisdiksi ekstrateritorial untuk mengkriminalisasi apapun aktivitas seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang Australia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> James McNicol dan Andreas Schloenhardt. *Australia's Child Sex Tourism Offences*. Current Issues In Criminal Justice. Volume 23 (3). 369-392. 2012

(3) *unstable factor*, yaitu menjelaskan mengenai bagaimana opini publik mengenai *child sex tourism* hingga persepsi Australia dalam memprediksikan bagaimana keberlanjutan situasi fenomena ini yang salah satunya ditunjukkan melalui *advertising campaign* dalam pelaksanaan *Project Childhood*.

## 1.7 Metodologi Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena yang telah berlangsung melalui karakteristik-karakteristik fenomena tersebut.<sup>37</sup> Penelitian tipedeskriptif dapat terdiri dari variabel tunggal maupun beberapa variabel yang digunakan untuk menentukan rumusan masalah penelitian. Penelitian dilakukan untuk memahami apa saja faktor domestik dalam kebijakan luar negeri Australia yang bertujuan untuk memerangi *Child Sex Tourism* di *Greater Mekong Subregion* melalui studi kasus *Project Childhood* 2010-2014.

Studi kasus yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk memfokuskan proses analisis dengan fenomena terkait. Sehingga proses analisis diharapkan dapat dilakukan lebih intensif guna menarik kesimpulan yang akurat. Adapun tipe penelitian deskriptif menggunakan studi kasus mengharuskan penulis untuk mengidentifikasi studi kasus berdasarkan sejarah atau fenomena sebelumnya, perkembangan serta kondisi-kondisi khususaat kasus tersebut terjadi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hossein Nassaji. *Qualitative And Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis*. Language Teaching Research, Vol 19(2). 129-132. 2015.

<sup>38</sup> Lima dan Valério. *Research Design: A Contribution To The Author*. Online Brazilian Journal of Nursing. 2011



### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Agar penelitian ini menjadi terfokus dan terarah pada rentang waktu tertentu, penulis menggunakan jangkauan penelitian antara tahun 2010 hingga 2014. Penggunaan jangkauan penelitian tersebut utamanya untuk menyesuaikan dengan studi kasus pada penelitian ini, yaitu *Project Childhood*. Penulis memulai jangkauan penelitian pada tahun 2010, sebab pada tahun tersebut Australia menginisiasi pembentukan *Project Childhood* yang ditunjukkan dengan penandatanganan kontrak *Project Childhood*. Sedangkan, pembatasan jangkauan penelitian yang berakhir tahun 2014, dipilih karena pada tahun tersebut *Project Childhood* dinyatakan telah selesai melakukan tugasnya

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Sesuai dengan namanya, data yang diperoleh untuk penelitian ini bukanlah menggunakan sumber pertama.<sup>39</sup> Data sekunder merupakan data dari sumber pertama yang telah diolah oleh pihak lain (contohnya media) dan pada umumnya pihak tersebut merupakan pengamat luar yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Sehingga, dalam hal teknik pengumpulan data sekunder ini penulis melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber yang

---

<sup>39</sup> Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2005.

mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, artikel jurnal penelitian terdahulu, *reports* dari instansi pemerintah Australia dan negara *Greater Sub Mekong Region, reports* oleh *Project Childhood*, serta artikel dari berbagai media yang memiliki kredibilitas.

#### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif berfokus pada menganalisis data yang bersifat selain angka. Umumnya, penggunaan teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran adanya kompleksitas dan keterkaitan interaksi antara sasaran penelitian.<sup>40</sup> Salah satunya, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna yang melandasi tingkah laku sang objek penelitian. Sehingga penelitian ini cocok digunakan untuk mendalami suatu fenomena sosial diberbagai level aktornya. Penulis memilih teknik analisis data kualitatif karena data yang digunakan penulis banyak bertumpu pada data selain angka, dan ditujukan untuk memahami makna yang melatar belakangi tingkah laku suatu aktor dalam sebuah fenomena sosial.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 1.8 Sistematika Penulisan

Demi mempermudah penjabaran penelitian oleh penulis dan pemahaman tulisan oleh pembaca, penulis akan membagi isi penelitian ini ke dalam empat bagian sebagai berikut :

1. **Bab I** berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian secara umum dan khusus, kerangka penelitian, sintesa pemikiran, argumen utama yang digunakan dalam penelitian, dan metodologi penelitian
2. **Bab II** berisi penjabaran terkait dinamika Australia dalam memerangi isu CST serta penjelasan umum *Project Childhood*.
3. **Bab III** berisi analisis berdasarkan konsep dari *domestic determinant foreign policy* yaitu *highly stable*, *moderately stable*, dan *unstable*.
4. **Bab IV** berisi kesimpulan dan saran

